

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memberikan pelayanan masyarakat aparat desa dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah semakin menjadi sorotan masyarakat karena mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, sedangkan aparatur berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan dan tidak diskriminatif.

Masyarakat saat ini tidak hanya menuntut pelayanan publik yang lebih efisien dan memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku administrasi publik yang lebih responsif dan mencerminkan kepatutan, keseimbangan etika dan kearifan. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah merupakan tuntutan yang wajar yang sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah dengan semakin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan etika pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah desa seperti: ketidakpastian pelayanan, pungutan liar, dan pengabaian hak dan martabat warga masyarakat sebagai pengguna pelayanan, masih amat mudah dijumpai di hampir setiap satuan pelayanan publik di desa.

Kantor Desa merupakan sebuah organisasi masyarakat yang didalamnya terdapat tindakan sosial yang tidak hanya ditentukan oleh kelakuan individu. Setiap organisasi berusaha untuk mampu meramalkan perilaku dan prestasi karyawannya sebagai tujuan manajemen organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Tujuan organisasi akan tercapai bila pimpinan melaksanakan tugasnya dengan baik mengadakan kerjasama dan hubungan yang erat dengan pegawainya. Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi yang telah ditetapkan tergantung dari seluruh komponen yang terlibat didalamnya, salah satu dari komponen adalah budaya organisasi, karena dengan budaya organisasi yang baik maka hubungan kerjasama dan hubungan yang akrab antara pimpinan dan pegawai (bawahan) akan menghasilkan kemampuan kerja yang optimal pada organisasi itu sendiri.

Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan dari suatu organisasi, sebaliknya budaya yang lemah akan menghambat atau bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi yang budayanya kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam dan diperjuangkan oleh sebagian besar para anggota organisasi (pegawai). Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kinerja pegawai dalam organisasi.

Dalam era modernisasi, pelayanan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat khususnya pemerintah desa. Paradigma perubahan pemerintah yang dulu sentralistik kini telah berubah menjadi

desentralisasi. Sistem desentralisasi atau biasa disebut *local government* memberikan kemudahan dalam kajian teknis untuk membentuk lingkungan kerja yang ideal pada suatu komunitas, memperluas pelayanan dan partisipasi, peningkatan responsibilitas serta pengawasan dapat dilakukan secara intensif oleh pemerintah.

Fenomena di era global yang mewarnai keragaman masyarakat sangat terlihat dengan munculnya berbagai suku baik yang terdapat di Indonesia, maupun berbagai suku bangsa di dunia yang tentunya diwarnai dengan berbagai adat istiadat, sistem nilai, kebiasaan, karakter, gaya hidup dan lain sebagainya. Setiap orang dalam menjalankan profesinya dituntut untuk selalu memiliki sikap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya terhadap hasilnya. Prinsip keadilan “menuntut seorang profesional untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya”. Prinsip otonomi diberlakukan bagi setiap penyandang profesi, karena seorang profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Di dalam melaksanakan profesinya”. Profesional tidak boleh melanggar hak orang lain, lembaga lain, ataupun hak warga negara. Para penyandang profesi dalam menjalankan profesinya haruslah tanpa pamrih, dan mendahulukan kepentingan klien/pelanggan/konsumen. Etika kerja akan membuat penyandang profesi melakukan suatu pengabdian, kewajiban, dan idealisme

Beberapa kenyataan pada birokrasi pemerintahan, khususnya pemerintahan di daerah bahwa pelayanan publik belum mencapai hasil yang efektif. Hal ini diasumsikan sebagai akibat dari kinerja pelayanan belum maksimal, terutama pada aspek perilaku dan sikap aparatur pemerintah yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugasnya, misalnya perbuatan dan tindakan yang benar, baik secara moral, jujur, adil dan nilai-nilai persamaan yang terbingkai dalam nilai-nilai kemanusiaan. Aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masih banyak yang memandang isu tentang etikabirokrasi, yaitu masalah moralitas sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik.

Agar para sebuah profesi bekerja profesional dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik, maka prinsipnya adalah harus memperhatikan mutu dari keterampilan dan keahlian yang diaplikasikannya. Dengan kata lain, menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya berkualitas. Kualitas ini mempunyai beberapa segi, yakni : harus mengusahakan agar para profesional di era modernisasi untuk menguasai tugas dengan sebaik-baiknya dan berkompeten. Selain itu, juga harus secara terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Cara bekerja para profesional harus efisien, efektif, mempunyai komunikasi yang baik antara atasan, memiliki etika kerja yang baik dan hasil pekerjaan sekurang-kurangnya sesuai dengan harapan pemakai/orang yang memanfaatkan atau menggunakan jasanya, tetapi tetap diusahakan agar selalu sempurna dan proporsional sesuai dengan profesinya. Jelas di era modernisasi, peran budaya komunikasi dan etika kerja

bagi sebuah profesi merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka membatasi pelanggaran-pelanggaran yang peluangnya sangat tinggi di era modernisasi ini.

Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi di era modernisasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan. Kenyataannya budaya organisasi dan era modernisasi terhadap etika kerja aparatur desa belum terlaksana dengan baik karena masih banyak aparatur/pejabat pelaksana pelayanan publik dalam melakukan pertimbangan dan tindakan cenderung mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum sehingga belum sesuai nilai moral, tidak benar, tidak adil dan masih membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Hal ini terjadi sebagai pencerminan sikap budaya organisasi yang berlaku di pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai “**Analisis Peran Budaya Organisasi Dan Era Modernisasi Terhadap Etika Kerja Aparatur Desa Margakaya Dalam Melayani Masyarakat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

Bagaimana peran budaya organisasi dan era modernisasi terhadap etika kerja aparatur desa Margakaya dalam melayani masyarakat?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menentukan judul dalam penelitian ini adalah :

“Analisis Peran Budaya Organisasi Dan Era Modernisasi Terhadap Etika Kerja Aparatur Desa Margakaya Dalam Melayani Masyarakat”.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah Budaya Organisasi dan Era Modernisasi.
2. Subjek penelitian yaitu Aparatur Desa Margakaya.
3. Tempat penelitian di Desa Margakaya.
4. Waktu penelitian 2021.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui Peran Budaya Organisasi Dan Era Modernisasi Terhadap Etika Kerja Aparatur Desa Dalam Melayani Masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran Budaya Organisasi Dan Era Modernisasi serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dalam bidang Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan Peran Budaya Organisasi Dan Era Modernisasi.

2) Bagi Kantor Desa Margakaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan informasi akan hal hal mengenai Etika Kerja Aparatur Desa Dalam Melayani Masyarakat.